

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMAN 1 Sekampung Kelas/Semester : XII/Ganjil
 Mata pelajaran : Sejarah Indonesia Alokasi Waktu : 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
 Materi pokok : Menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Pertemuan ke : 1

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, dan APRA.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa. • Guru melakukan absensi terhadap peserta didik. • Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel). • Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. • Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. • Guru memberikan penjelasan terkait materi. • Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. • Guru membimbing peserta didik untuk membuat resume terkait materi. • Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik. • Setelah selesai, resume dikumpulkan kepada guru. • Guru melaksanakan penilaian pengetahuan dengan soal tertulis. • Bersama peserta didik, guru mengoreksi soal dan membahasnya. • Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. • Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya. • Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa. • Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Setelah Indonesia merdeka, muncul tantangann yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya ialah adanya upaya pemisahan/disintegrasi atau pengambilan kekuasaan secara paksa dari pemerintah yang sah. Raymond Westerling adalah pemimpin pemberontakan . . .
 - DI/TII ACEH
 - DI/TII JAWA BARAT
 - DI/TII SULAWESI SELATAN
 - PKI MADIUN
 - APRA
- Daerah Jawa Barat yang cukup sentral bagi negara Indonesia ternyata harus diserahkan kepada Belanda sebagaimana isi dari perjanjian Renville. Hasilnya TNI harus berpindah ke Jawa Tengah. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemberontak untuk melakukan upaya disintegrasi yakni dengan mendirikan DI/TII Jawa Barat yang dipimpin oleh . . .
 - S.M KARTOSOEWIRJO
 - DAUD BEUREUH
 - KAHAR MUZAKKAR
 - IBNU HAJAR
 - RAYMOND WESTERLING
- APRA merupakan pemberontakan yang disebabkan oleh ketidaksetujuan atas dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berintikan TNI. Adapun basis pemberontakan APRA berada di kota . . .
 - Bandung
 - Bogor
 - Tasikmalaya
 - Majalengka
 - Indramayu
- Pemberontakan PKI Madiun selain mendapatkan dukungan dari golongan kiri, juga didukung oleh FDR pimpinan dari . . .
 - Amir Syarifuddin
 - Tan Malaka
 - D.N Aidit
 - Lukman
 - Nyoto
- Pemberontakan yang dilakukan Amir Fatah merupakan bagian dari DI/TII dengan daerah operasi . . .
 - Jawa Tengah
 - Banjarmasin
 - Aceh
 - Sulawesi Selatan
 - Tasikmalaya

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/proyek yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Peristiwa PKI Madiun, DI/TII dan APRA

Upaya disintegritas yang pernah terjadi kurun waktu 1948-1965 yakni:

a. Pemberontakan PKI Madiun 1948

PKI merupakan salah satu partai atau organisasi politik yang berdiri sejak penjajahan Belanda. Pasca proklamasi muncul dorongan dari orang-orang PKI untuk melakukan sebuah aksi, yakni mengambil alih pemerintahan dari tangan Presiden Soekarno dan Wakil presiden Mohammad Hatta. Dengan pimpinan di bawah seorang tokoh yang bernama Musso, PKI bersama dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pimpinan Amir Syarifuddin melakukan sebuah aksi di Madiun, hal ini adalah sebuah bentuk upaya disintegrasi yang nyata.

Pemberontakan ini sekaligus diwarnai dengan kecaman yang dilontarkan oleh pemimpin PKI kepada pemerintah, hal itu membuat tidak sedikit dari rakyat yang termakan pernyataan Musso dan bergabung dalam kelompok pemberontak. Dengan berani kemudian Musso memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun.

Menghadapi situasi ini pemerintah Indonesiamelalui Presiden Sukarno melakukan sebuah pidato yang intinya untuk tetap melakukan persatuan di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil presiden Mohammad Hatta.

Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa, selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A. H. Nasution. Kemudian juga dilakukan operasi militer guna meredakan pemberontakan ini. Pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur pemberontak. Musso pimpinan pemberontak akhirnya tewas tertembak, sementara pemimpin pemberontak yang lain, Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dijatihu hukuman mati.

b. Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia berawal dari suatu aksi dari kelompok yang dipimpin oleh S.M Kartosoewirjo di daerah Jawa Barat. Namun aksi tersebut kemudian mendapatkan dukungan dari daerah lain di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Pemberontakan ini juga termasuk aksi yang sangat merepotkan pemerintah Indonesia, pasalnya pemberontakan bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia mengusir Belanda yang berupaya kembali menguasai Indonesia. Berikut adalah aksi-aksi dari DI/TII diberbagai daerah:

1. DI/TII Jawa Barat

Adanya Perjanjian Renville dalam isinya memaksa agar pasukan TNI untuk hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh S.M Kartosoewirjo yang membawahi laskar Hizbullah dan Sabilillah yang tidak bersedia ikut berhijrah menyatakan berdirinya Darul Islam (DI) dan tentaranya bernama Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada bulan Agustus 1948.

Untuk menyelesaikan pemberontakan ini pemerintah membentuk operasi militer bernama Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha. Melalui dua operasi ini akhirnya pemerintah Indonesia dapat menumpas para pemberontak. S.M Kartosoewiryo yang tertangkap kemudian dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi pada 16 Agustus 1962.

2. DI/TII Jawa Tengah

Persamaan ideologi antara Amir Fatah (seorang pimpinan Hizbullah) dengan S.M Kartosoewirjo mengenai pembentukan negara Islam melahirkan pemberontakan di Jawa Tengah yang serupa dengan di Jawa Barat. Amir Fatah kemudian diangkat sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia (TII) Jawa Tengah. Ia bahkan memproklamasikan berdirinya Negara Islam (Darul Islam/DI) Jawa Tengah. Sejak saat terjadi ketegangan antara pasukan TNI dengan pemberontak Amir Fatah.

Untuk menumpas pemberontakan ini pada bulan Januari 1950 pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut "Gerakan Banteng Negara" (GBN) di bawah Letnan Kolonel Sarbini (selanjut-nya diganti Letnan Kolonel M. Bachrun dan kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yani). Gerakan operasi ini dengan pasukan "Banteng Raiders."

Selain Amir Fatah pemberontakan di Jawa Tengah juga dilakukan oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal dengan Kyai Sumolangu yang didukung laskar Angkatan Umat Islam (AUI) di daerah Kebumen. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu kurang lebih tiga bulan.

Pemberontakan DI/TII juga terjadi di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI/TII pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melakukan "Operasi Merdeka Timur" yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. Pada awal tahun 1952 kekuatan Batalyon pemberontak tersebut dapat dihancurkan dan sisa- sisanya melarikan diri ke Jawa Barat dan ke daerah GBN.

3. DI/TII Sulawesi Selatan

Pemberontakan dilakukan oleh Kahar Muzakkar bersama pasukannya. Adapun sebab pemberontakan adalah rasa tidak puas terhadap pemerintah terhadap kebijakan pembentukan tentara nasional di Sulawesi Selatan. Para gerilyawan yang merasa kurang diperhatikan dalam pembentukan tentara nasional tersebut lantas melakukan pemberontakan dan memilih bergabung dengan Darul Islam yang dipimpin oleh S.M Kartosoewirjo. Perlu waktu lama bagi pemerintah untuk membereskan pemberontakan ini. Hingga akhirnya pada tahun 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati dalam suatu penyerangan.

4. DI/TII Kalimantan Selatan

Pemberontakan disebabkan oleh rasa tidak puas anggota Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV terhadap demobilisasi tentara dari pemerintah pusat. Mereka merasa tidak mendapatkan jabatan atau kedudukan yang sesuai dengan keinginan mereka. Aksi membelot kemudian terjadi, Ibnu Hajar sebagai pimpinan pemberontak berhasil mengumpulkan dukungan. Ia membentuk pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas (KRlyT). Kerusuhan pun terjadi di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar memproklamasikan daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari DI/TII Kartosoewirjo. Ia kemudian diangkat sebagai Panglima TII Kalimantan. Pemberontakan berhasil dipadamkan pemerintah pada tahun 1963, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati.

5. DI/TII Aceh

Pemberontakan dipimpin oleh Daud Beureuh, yang disebabkan oleh penggabungan daerah Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara pada tahun 1950. Daud Beureuh yang merupakan pemimpin dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), menentang kebijakan itu. Ia menginginkan Aceh menjadi Provinsi otonom, bukan bergabung dengan provinsi lain. Usaha dialog dengan Daud Beureuh agar berdamai gagal. Daud Beureuh bahkan turut memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari DI/TII Kartosoewirjo pada tahun 1953.

Dengan kekuatan bersenjata, Pemerintah menyatakan seluruh Aceh menjadi daerah "Militaire bystand" sesuai dengan keputusan Presiden No. 175 tahun 1952. Selain itu Pemerintah Indonesia membentuk operasi khusus militer untuk menumpas pemberontakan ini yaitu dengan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan dengan cara diplomasi, Pemerintah Indonesia mengirimkan utusan-utusan khusus untuk berdialog dengan pihak pemberontak khususnya dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Akhirnya dengan negosiasi yang panjang serta disepakatinya status otonomi yang khusus bagi Aceh yaitu dengan terbentuknya Daerah Istimewa Aceh dengan kebebasan menjalankan unsur-unsur Syariat Islam di dalamnya, maka berakhirilah pemberontakan DI/TII Aceh dan terciptalah perdamaian yang sekian lama diidamkan oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh. Untuk merayakan perdamaian tersebut diselenggarakan suatu upacara akbar di Blangpadang tanggal 18-22 Desember 1962 yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA). Dengan adanya perdamaian tersebut, maka Pemerintah dan rakyat Aceh akan bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta Aceh pada khususnya.

c. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki Kota Bandung yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bersama mantan anggota KNIL (tentara Belanda). Aksi ini disebabkan oleh ketidaksetujuan atas dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. APRA berkeinginan agar negara Pasundan tetap dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai pasukan inti di dalam negara Pasundan.

Aksi yang dilancarkan APRA berhasil menewaskan anggota APRIS dari Divisi Siliwangi. Bahkan kemudian APRA juga melancarkan aksi percobaan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B Simatupang di Jakarta. Namun aksi itu gagal hingga akhirnya APRA berhasil dilumpuhkan oleh TNI, sementara itu Raymond Westerling berhasil lolos dan kabur ke Belanda.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Menghadapi ancaman disintegrasi	Pertemuan ke	: 2

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain peristiwa Andi Aziz dan RMS.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang peristiwa Andi Aziz dan RMS.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat infografis terkait peristiwa Andi Aziz dan RMS.• Peserta didik membuat infografis dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat infografis.• Setelah selesai, infografis dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Operasi militer guna meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz dipimpin oleh
 - Soeharto
 - Alex Kawilarang
 - Slamet Riyadi
 - J. Leimena
 - Sediarto
- Soumokil menentang adanya NKRI, sikap yang ia lakukan terhadap adanya NKRI ialah
 - Memproklamasikan RMS
 - Memproklamasikan PRRI/PERMESTA
 - Memproklamasikan DI/TII
 - Memproklamasikan APRA
 - Memproklamasikan OPM
- Tokoh yang diutus pemerintah guna bertemu Soumokil untuk menyelesaikan masalah di Maluku dengan jalan damai ialah
 - Dr. Leimena
 - J. Latuharhary
 - Sam Ratulangie
 - J. Dimara
 - Alex Kawilarang
- Perwira TNI yang gugur dalam menumpas pemberontakan RMS ialah
 - Slamet Riyadi
 - Yos Soedarso
 - Mokoginta
 - Frans Kaisepo
 - Abdurahman Saleh
- Dari beberapa pemberontakan di bawah ini yang tujuannya ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia adalah.....
 - PRRI
 - PERMESTA
 - APRA
 - RMS
 - ANDI AZIZ

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuain dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Peristiwa Andi Aziz dan RMS

A. PERISTIWA ANDI AZIZ

Ø Sebab:

Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz sendiri, Ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Aziz bersama gerombolannya ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS.

Ø Kronologi Peristiwa:

Pada 5 April 1950, terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pasukan Andi Aziz melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menangkap Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada 8 April 1950 yang memerintahkan kepada Andi Aziz agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4 x 24 jam. Ia juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan.

Ternyata Andi Aziz sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, pada saat itu terjadilah pertempuran.

Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makasar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

B. PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)

Ø Sebab:

Keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL.

Ø Kronologi Peristiwa:

Pada tanggal 25 April 1950 Seorang mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, memproklamkan berdirinya Republik Maluku Selatan. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat.

Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang mengutus dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang.

Meski kota Ambon sebagai ibukota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Soediarso yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Menghadapi ancaman disintegrasi	Pertemuan ke	: 3

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain peristiwa PRRI dan PERMESTA.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang peristiwa PRRI dan PERMESTA.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat artikel terkait peristiwa PRRI dan PERMESTA.• Peserta didik membuat artikel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat artikel.• Setelah selesai, artikel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Jelaskan penyebab utama munculnya aksi dari PRRI/PERMESTA!	Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).	50
2.	Jelaskan langkah pemerintah untuk menumpas pemberontakan PERMESTA!	Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dikemudikan oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat.	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Peristiwa PRRI dan Permesta

PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta.

Ø Sebab:

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Ø Kronologi Peristiwa:

Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti:

§ Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

§ Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon.

§ Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol. Barlian.

§ Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusatpun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal.

Ahmad Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat.

Seluruh dewan perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari partai Masyumi yang dikenal anti PKI.

Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah, menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat (Kabinet Juanda).

Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis.

Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dikemudikan oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Menghadapi ancaman disintegrasi	Pertemuan ke	: 4

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain peristiwa Gerakan 30 September 1965.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresmum materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat tabel teori-teori tentang terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.• Peserta didik membuat tabel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat tabel.• Setelah selesai, tabel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya melaksanakan Ulangan Harian (UH) 1 materi upaya menghadapi disintegrasi bangsa.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Dari beberapa korban dari Gerakan 30 September 1965, manakah yang tidak termasuk anggota TNI AD?
 - Ahmad Yani
 - Soeprapto
 - D.I Panjaitan
 - Karel Satsuit Tubun**
 - Soegiono
- Teori tentang Gerakan 30 September 1965 yang menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi akibat adanya berbagai kepentingan atau tidak ada dalang tunggal disebut
 - Teori Chaos
 - Teori PKI
 - Teori CIA
 - Teori Soeharto
 - Teori Soekarno
- Dua perwira TNI yang menjadi korban peristiwa G 30 S di Yogyakarta ialah
 - Soeharto dan Sungkono
 - Sungkono dan Sugiono**
 - Suparman dan Suprpto
 - Haryono dan Sungkono
 - Suparman dan Sugiono
- Setelah menguasai RRI, Letkol Untung Syamsuri mengumumkan berdirinya dewan
 - Revolusi**
 - Jendral
 - Manguni
 - Reformasi
 - Rakyat
- Nama pasukan yang melakukan aksi penculikan terhadap perwira Angkatan Darat ialah
 - Kko
 - Kostrad
 - RPKAD
 - Cakrabairawa
 - Cakrabirawa**

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuain dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Peristiwa Gerakan 30 September 1965

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa (pasukan pengawal Istana) memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI.

Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian.

Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah:

- Letnan Jendral Anumerta Ahmad Yani
- Mayor Jendral Raden Soeprapto
- Mayor Jendral Mas Tirtodarmo Haryono
- Mayor Jendral Siswondo Parman
- Brigadir Jendral Donald Isaac Panjaitan
- Brigadir Jendral Sutoyo Siswodiharjo

Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi, putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya, Lettu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di Lubang Buaya.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Kegiatan	: Ulangan Harian (UH) 1 Upaya Menghadapi Disintegrasi	Pertemuan ke	: 5

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, kertas, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tes Tertulis.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk ulangan harian (UH).
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi yang akan diujikan.• Guru memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan ulangan harian (UH).• Guru membagikan lembar soal dalam bentuk tes tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru melakukan penilaian sikap peserta didik.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah diujikan guna persiapan remedial dan pengayaan.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan penjelasan program remedial dan program pengayaan.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN, REMEDIAL DAN PENGAYAAN

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

- Butir Soal:

1. Jelaskan kronologi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun! (poin 25)
2. Mengapa Daud Beureuh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI? (poin 25)
3. Jelaskan langkah pemerintah untuk menumpas pemberontakan RMS! (poin 25)
4. Jelaskan pengaruh Amerika Serikat dalam peristiwa PERMESTA! (poin 25)
5. Tuliskan korban dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965! (poin 25)

- Kisi-kisi Soal

Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian (UH)

Sekolah : SMA Negeri 1 Sekampung
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
 Kelas : XII
 Bentuk Soal : Uraian
 Jumlah Soal : 4

No.	Kompetensi Dasar	Kelas	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	No. Soal	Bentuk Soal
1.	Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.	12	Peristiwa PKI Madiun	Menganalisis peristiwa PKI Madiun.	L2	1	Uraian
2.	Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.	12	Peristiwa DI/TII	Menganalisis peristiwa DI/TII	L2	2	Uraian
3.	Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.	12	Peristiwa RMS	Menganalisis peristiwa RMS	L2	3	Uraian
4.	Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.	12	Peristiwa PERMESTA	Menganalisis peristiwa PRRI/PERMESATA	L2	4	Uraian
5.	Menganalisis upaya	12	Peristiwa G	Menganalisis G 30 S	L2	5	Uraian

	bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.		30 S 1965	1965			
--	---	--	-----------	------	--	--	--

- Program Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru memberikan perlakuan penyampaian materi kembali dengan moda daring (peserta didik menyimak bahan ajar/video yang guru bagikan). Kemudian peserta didik diberikan soal tambahan, sebagai berikut :

Membuat video vlog tentang faktor-faktor penyebab terjadinya disintegrasi (*Poin 100*)

No	Nama	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Ket
1						
2						
Dst						

- Program Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan berupa :

Membuat video vlog mengenai langkah yang dapat diambil untuk menangkal disintegrasi. (*Poin 100*)

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional Dan Daerah	Pertemuan ke	: 6

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945–1965.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresmum materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat artikel singkat pejuang nasional antara tahun 1945-1965.• Peserta didik membuat artikel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat artikel.• Setelah selesai, artikel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Jelaskan peranan pejuang Sultan Hamengkubuwono IX bagi bangsa Indonesia!	- Menyatakan Yogyakarta bagian dari NKRI - Mengeluarkan Maklumat No. 5 tahun 1945 - Menolak bekerjasama dengan Belanda	50
2.	Apa yang kalian ketahui tentang perjuangan tokoh Yos Soedarmo?	Laksamana Madya TNI Yos Sudarso berjuang dalam pertempuran di Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Ia meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macan Tutul.	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional

Masa setelah kemerdekaan Indonesia. Walaupun Indonesia telah berhasil menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, nyatanya bangsa Belanda belum menerima keputusan tersebut. Akhirnya Belanda dengan NICA berusaha menjajah kembali Indonesia. Agresi militer 1 dan agresi militer 2 yang dilakukan Belanda adalah bukti keseriusan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat 2 agresi yang dilakukan oleh Belanda ini, terlihat tidak ada ketakutan dari para tokoh-tokoh Indonesia. Mereka mencoba untuk selalu menjaga kemerdekaan Indonesia dengan porsir dan kemampuan masing-masing.

Ir Sukarno, Dr Mohammad Hatta dan tokoh yang bergerak di pemerintahan. Sebagai tokoh dibalik pemerintahan Indonesia, Ir Sukarno dan Dr Hatta melakukan perannya sebagai negosiator dalam upaya menghentikan agresi Belanda di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya beberapa perjanjian seperti perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perjanjian Roem-Royan, dan perjanjian KLB.

Sementara tokoh-tokoh nasional di bagian militer. Sebagai tokoh nasional yang menjadi tentara, tokoh macam Letkol Suharto, Urip Sumoharjo, dan Jenderal Sudirman melakukan tugasnya sebagai penyemangat rakyat untuk melawan agresi Belanda. Dengan gigih, ulet, dan pantang menyerah merupakan nilai-nilai yang diterapkan oleh pahlawan dari militer ini.

Peristiwa setelah agresi Belanda. Setelah agresi Belanda, Indonesia tidak sepenuhnya dapat menikmati kemerdekaannya dikarenakan Belanda turut ikut campur dalam mengatur jalannya pemerintahan. Hal itu tak jarang menyebabkan berbagai macam tindakan separtis dan pemberontakan. Setiap tokoh-tokoh nasional tersebut dapat menjalankan peran sesuai dengan apa yang ia mampu. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diambil cukup banyak, antara lain adalah nilai kesatuan dan persatuan, gagah berani, ulet, dan berjiwa besar menerima segala kejadian yang pernah terjadi.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional Dan Daerah	Pertemuan ke	: 7

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945–1965.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh daerah.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat artikel singkat pejuang daerah Lampung antara tahun 1945-1965.• Peserta didik membuat artikel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat artikel.• Setelah selesai, artikel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Jelaskan kebijakan pemerintah daerah Lampung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Lampung tahun 1948-1949!	Pemerintah daerah Lampung mendirikan pemerintahan darurat karesidenan Lampung guna menjaga jalannya pemerintahan. Hal itu sekaligus untuk menunjukkan dimata Belanda bahwa rakyat Lampung tetap setia mendukung pemerintah Indonesia.	50
2.	Tuliskan nama-nama tokoh di Lampung yang berjuang kurun waktu 1945-1965?	- Gele Harun - K.H Hanafiah - K.H Gholib - dll.	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuain dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Peran Dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Daerah Lampung

Gele Harun

Kondisi perang yang dimulai tidak lama setelah Indonesia merdeka seiring masuknya Belanda membuat Gele Harun terlibat langsung dalam kancah pertempuran. Ia memimpin Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Palembang kendati masih menjabat Ketua Mahkamah Tentara Sumatera Selatan yang diembannya sejak 1947. Sejak akhir 1948, Belanda menduduki Tanjungkarang, ibukota Karesidenan Lampung. Kondisi ini membuat para pejabat Karesidenan Lampung saat itu, termasuk Rukadi selaku residen, menyingkir dari Tanjungkarang, sehingga terjadi kekosongan pemerintahan. Atas dasar itulah, seperti diungkap dalam Sejarah Daerah Lampung (1981), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Karesidenan, setelah bermusyawarah dengan para pimpinan partai politik, pada 5 Januari 1949 sepakat untuk mengangkat Gele Harun Nasution sebagai Kepala Pemerintah Darurat atau Pejabat Pelaksana Tugas Residen Lampung

K.H Ghalib

Ketika Belanda ingin melancarkan agresinya yang kedua tahun 1949, maka ratusan ulama di Lampung pun merapatkan barisan menghimpun kekuatan. Mereka berkumpul di sebuah pesantren KH. Gholib untuk membahas hukum perang melawan Belanda. Di antara ulama yang berkumpul adalah, KH. Hanafiah dari Sukadana, KH. Nawawi Umar dari Telukbetung, KH. Abdul Rozak Rais dari Penengahan, Kedondong, KH. Umar Murod dari Pagardewa (kini Kabupaten Tulangbawang Barat). Kemudian KH. Aman dari Tanjungkarang, Kiai M. Yasin dari Tanjungkarang (Ketua Masyumi Lampung saat itu), KH. A. Rauf Ali dari Telukbetung dan KH A. Razak Arsad dari Lampung Utara. Hasil dari musyawarah menetapkan hukum perang melawan Belanda mempertahankan kemerdekaan dan ketinggian Islam adalah fardu ain. Setelah fatwa keluar, Hanafiah dan pasukan Laskar Hizbullah dan Sabilillah Pringsewu menuju Baturaja, Sumatera Selatan, untuk membantu Tentara Republik Indonesia (TRI) melawan Belanda, setelah Palembang diduduki. Kiai Gholib ketika penjajahan Jepang juga banyak menentang program Jepang seperti sei kerie tahun 1942. Tindakan Jepang sudah menindas, menyiksa dan memeras. Dia segera menyiapkan pasukan mengusir Jepang dari Tanah Bamboo Seribu (sekarang Pringsewu). Tak heran jika kiprahnya berjibaku mengusir penjajah ini, kerap dibalas dengan masuk penjara oleh militer penjajah. Apalagi Gholib menggalang opini menolak ajakan Jepang menyembah Dewa Matahari (Tenno Heika, Kaisar Hirohito). Sosok yang lahir tahun 1899 di Kampung Modjosantren, Krian, Jawa Timur ini dengan semangat jihad terus memimpin pertempuran untuk mengusir penjajah.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Demokrasi Parleментар	Pertemuan ke	: 8

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parleментар. 2. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parleментар 1950-1959.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, handphone android dan laptop. 2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific). 2. Model : Discovery learning. 3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang perkembangan kabinet masa Demokrasi Parleментар.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat tabel perkembangan kabinet masa Demokrasi Parleментар.• Peserta didik membuat tabel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat tabel.• Setelah selesai, tabel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Apa dasar diberlakukannya Demokrasi Parlementer?	UUD Sementara 1950.	50
2.	Tuliskan nama-nama kabinet yang memerintah tahun 1950-1959!	Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957; dan Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer

Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengantahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950.

Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula Demokrasi Liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai *Zaken* Kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957; dan Kabinet Djuanda (*Zaken* Kabinet) 1957-1959.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer	Pertemuan ke	: 9

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer. 2. Menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop. 2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific). 2. Model : Discovery learning. 3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang sistem kepartaian masa Demokrasi Parlementer.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat vlog sistem kepartaian masa Demokrasi Parlementer.• Peserta didik membuat vlog dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat vlog.• Setelah selesai, vlog dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Pemilu tahun 1955 dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis dalam kehidupan politik negara Indonesia. Dalam pemilu tersebut dipilih dua lembaga yakni
 - DPR dan MPR
 - DPR dan DPD
 - DPR dan Konstituante**
 - Konstituante dan Mahkamah Agung
 - MPR dan Konstituante
- Konstituante yang menjadi agenda pemilihan tahun 1955, memiliki tugas untuk
 - Mengawasi pemerintahan
 - Mengadili sengketa pemilu
 - Menjadi penasihat presiden
 - Membentuk UUD baru**
 - Sebagai dewan konsultasi pemerintahan
- Berikut ini ideologi atau dasar yang tidak mendasari partai-partai politik yang lahir setelah adanya maklumat 3 November 1945 adalah
 - Chauvinisme**
 - Agama
 - Nasionalis
 - Komunis
 - Sosialis
- Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan oleh
 - Sukarno
 - Mohammad Hatta**
 - Sutan Syahrir
 - Natsir
 - Muhammad Yamin
- Urutan empat besar partai pemenang pemilu tahun 1955 adalah
 - PNI, NU, MASYUMI, PKI
 - PNI, PKI, MASYUMI, NU
 - PNI, NU, MASYUMI, PSI
 - PNI, MASYUMI, NU, PKI**
 - PKI, MASYUMI, NU, PNI

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Parlementer

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca-proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru.

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Demokrasi Parleментар	Pertemuan ke	: 10

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parleментар. 2. Menjelaskan kondisi ekonomi selama masa Demokrasi Parleментар 1950-1959.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop. 2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific). 2. Model : Discovery learning. 3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang kondisi ekonomi masa Demokrasi Parleментар.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat buklet kondisi ekonomi masa Demokrasi Parleментар.• Peserta didik membuat buklet dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat buklet.• Setelah selesai, buklet dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering). Yakni dengan melakukan memotong semua uang yang bernilai di atas
 - Rp 0,5
 - Rp 1
 - Rp 1,5
 - Rp 2
 - Rp 2,5
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pernyataan ini merupakan salah satu program dalam sistem ekonomi
 - Gunting Syafrudin
 - Gerakan Benteng
 - Gerakan Ali-Baba
 - Sanering
 - Munap
- Pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Hal tersebut merupakan sistem ekonomi yang disebut dengan
 - Gunting Syafrudin
 - Gerakan Benteng
 - Gerakan Ali-Baba
 - Gerakan Asaat
 - Munap
- Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dikeluarkan kebijakan ekonomi
 - Gunting Syafrudin
 - Gerakan Benteng
 - Gerakan Ali-Baba
 - Munap
 - Dekon
- Nama bank milik Belanda yang dinasionalisasi pemerintah RI tahun 1951
 - Lamongche Volksbank
 - Javasche Volksbank
 - Natherland Indische Bank
 - De Javasche Bank
 - De Javasche Volksbank

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Sistem Ekonomi Liberal

Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah, nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah penambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah Perang Korea.

Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin	Pertemuan ke	: 11

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Memahami perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin mulai dari Menuju Demokrasi Terpimpin, Peta Kekuatan Politik Nasional, Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trihora) dan Konfrontasi Malaysia (Dwikora).	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat buklet perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.• Peserta didik membuat buklet dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat buklet.• Setelah selesai, buklet dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Masalah yang menyebabkan memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia di awal tahun 1960-an adalah
 - Pembentukan negara Singapura
 - Pembentukan negara Serawak
 - Pembentukan Federasi Malaya**
 - Pembubaran negara Malaysia
 - Pembentukan negara Sabah
- Untuk merebut Irian Barat, presiden Sukarno menyuarkan sebuah kebijakan yang disebut
 - Dwikora
 - Trikora**
 - Tritura
 - Ganyang Malaysia
 - Konsepsi presiden
- Dibawah ini yang bukan isi dari Dekrit Presiden adalah
 - Dibubarkannya Konstituante
 - Berlakunya UUDS 1950**
 - Berlakunya UUD 1945
 - Pembentukan MPRS
 - Pembentukan DPAS
- Penyebab utama dari Indonesia keluar dari PBB ialah
 - Malaysia diterima sebagai anggota dewan keamanan PBB
 - Malaysia menjadi sekjen PBB
 - Malaysia diterima sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB**
 - Malaysia membentuk Federasi Malaya
 - Malaysia mendapatkan bantuan ekonomi dari PBB

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap Pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa "era 'demokrasi raba-raba' telah ditutup". Namun pada kenyataannya, hal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata.

Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam Pemilihan Umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari

jatuh banggunya kabinet. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat (koalisi) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Lebih jauh Presiden Soekarno juga menekankan bahwa Demokrasi Liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi Terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut, *Pertama*, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. *Kedua*, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbang kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem Demokrasi Parlemerter yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan Demokrasi Terpimpin.

Melalui panitia perumus Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Usulan ini berawal dari KSAD Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan UUD Sementara 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan, namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin	Pertemuan ke	: 12

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Memahami kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terkait dengan Dewan Perancang Nasional, Devaluasi Mata Uang, Deklarasi Ekonomi.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi tentang kebijakan dan sistem ekonomi.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat artikel kebijakan dan sistem ekonomi.• Peserta didik membuat artikel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat artikel .• Setelah selesai, artikel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya ulangan harian (UH).• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

- Pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin dimulai dengan peristiwa . . .
 - Rapat Raksasa di IKADA
 - Kunjungan Presiden Soekarno ke Rusia
 - Dekrit Presiden 5 Juli 1959**
 - Operasi Dwikora
 - 17 Agustus 1950
- Berikut ini yang tidak sesuai dengan Depernas adalah . . .
 - Berdiri 15 Agustus 1959
 - Diketuai oleh Mohammad Yamin
 - Program kerjanya berupa pola pembangunan nasional (Pola Pembangunan Semesta Berencana)
 - Memiliki Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint**
 - Tugas Depernas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.
- Berapakah jumlah nominal uang yang dibekukan oleh pemerintah saat terjadi kebijakan penurunan nilai mata uang?
 - Rp 5000
 - Rp 15.000
 - Rp 25.000**
 - Rp 250.000
 - Rp 2.500.000
- Untuk memperbaiki ekonomi, pemerintah mencanangkan Deklarasi ekonomi atau Dekon yang memiliki tujuan utama . . .
 - Menyehatkan ekonomi dengan menggunakan semua produk dalam negeri
 - Menghentikan impor dan menggiatkan ekspor**
 - Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme.
 - Menciptakan ekonomi Pancasila
 - Memakmurkan kehidupan berbangsa melalui peningkatan usaha kerakyatan dan padat karya
- Salah satu hal yang membuat ekonomi Indonesia terpuruk pada masa Demokrasi Terpimpin adalah karena adanya Proyek-proyek Mercusuar. Di bawah ini bangunan yang terkait dengan Proyek Mercusuar adalah . . .
 - Jembatan Ampera
 - Jembatan Pasupati Bandung
 - Masjid Istiqlal
 - Pusat pertokoan Sarinah**
 - Gedung Merdeka

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya *herordering* ekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa Demokrasi Liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan *sanering* mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000,00 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun *overall planning* yang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui *grand strategy*, yaitu perencanaan *overall* dan hubungan pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.

Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas *Blueprint* tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.

Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS. Kebijakan *sanering* yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan Rp500,00 dan Rp1.000,00 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50,00 dan Rp100,00. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000,00 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000,00 dan Rp500,00 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100,00 dan Rp50,00 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI/TII Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Kegiatan	: Ulangan Harian (UH) 2 Demokrasi Parleментар dan Terpimpin	Pertemuan ke	: 13

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. 2. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, kertas, pena, handphone android dan laptop. 2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
D. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific). 2. Model : Discovery learning. 3. Metode : Tes Tertulis.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk ulangan harian (UH).
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi yang akan diujikan.• Guru memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan ulangan harian (UH).• Guru membagikan lembar soal dalam bentuk tes tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru melakukan penilaian sikap peserta didik.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah diujikan guna persiapan remedial dan pengayaan.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan penjelasan program remedial dan program pengayaan.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN, REMEDIAL DAN PENGAYAAN

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

- Butir Soal:

- Berikan alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950-an adalah multi partai. Kaitkan analisis kalian dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta! (poin 20)
- Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014! (poin 20)
- Jelaskan tujuan diberlakukannya kebijakan ekonomi Benteng. (poin 20)
- Jelaskan latar belakang terjadinya:
 - upaya pembebasan Irian melalui operasi militer
 - konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. (poin 20)
- Jelaskan tentang kebijakan sanering yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1959. (poin 20)

- Kisi-kisi Soal

Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian (UH)

Sekolah : SMA Negeri 1 Sekampung
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
 Kelas : XII
 Bentuk Soal : Uraian
 Jumlah Soal : 4

No.	Kompetensi Dasar	Kelas	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	No. Soal	Bentuk Soal
1.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.	12	Sistem politik masa Demokrasi Liberal	Menganalisis sistem politik masa Demokrasi Liberal.	L2	1	Uraian
2.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.	12	Pemilu tahun 1955	Menganalisis peristiwa Pemilu 1955.	L2	2	Uraian
3.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.	12	Ekonomi Benteng	Menganalisis kebijakan ekonomi Benteng	L2	3	Uraian
4.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.	12	Kebijakan politik masa Demokrasi Terpimpin	Menganalisis politik masa Demokrasi Terpimpin	L2	4	Uraian
5.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan	12	Kebijakan ekonomi masa	Menganalisis ekonomi masa Demokrasi Terpimpin	L2	5	Uraian

	ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.		Demokrasi Terpimpin			
--	---	--	---------------------	--	--	--

- Program Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru memberikan perlakuan penyampaian materi kembali dengan moda daring (peserta didik menyimak bahan ajar/video yang guru bagikan). Kemudian peserta didik diberikan soal tambahan, sebagai berikut :

Membuat video vlog tentang membandingkan Pemilu tahun 1955 dan Reformasi. (Poin 100)

No	Nama	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Ket
1						
2						
Dst						

- Program Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan berupa :

Membuat video vlog mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia masa Demokrasi Terpimpin. (Poin 100)

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Orde Baru	Pertemuan ke	: 14

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa Demokrasi Terpimpin dengan masa Orde Baru.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi awal munculnya Orde Baru (Tritura).• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat infografis awal munculnya Orde Baru (Tritura).• Peserta didik membuat infografis dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat infografis.• Setelah selesai, infografis dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Jelaskan proses lahirnya Orde Baru!	Lahirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tidak terlepas dari berbagai macam peristiwa antara tahun 1965 hingga 1966. Adapun peristiwa pertama yang membuka langkah lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini sekaligus menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.	50
2.	Tuliskan isi dari Tritura!	1. Pembubaran PKI 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur Gerakan 30 September 1965 3. Penurunan harga/perbaiki ekonomi	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Aksi Tritura

Lahirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tidak terlepas dari berbagai macam peristiwa antara tahun 1965 hingga 1966. Adapun peristiwa pertama yang membuka langkah lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini sekaligus menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 membuat kondisi pemerintahan menjadi terpuruk. Rakyat yang diwakili oleh mahasiswa menuntut perbaikan-perbaikan. Baik di dalam pemerintahan maupun ekonomi. Pasaunya pada masa berlangsungnya Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kondisi lemah. Keadaan ekonomi kian memburuk dimana inflasi mencapai 600%.

Kondisi ini kemudian menyulut aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka turun ke jalan, meneriakkan slogan-slogan yang menuntut perubahan kebijakan oleh pemerintah.

Bukan hanya mahasiswa, rakyat pada umumnya kemudian turut melakukan aksi dengan membentuk kesatuan aksi masing-masing, seperti:

1. Kesatuan Aksi Pemuda-pemuda, Mahasiswa dan Pelajar (KAPPI)
2. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
3. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
4. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)

5. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

6. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

Kesatuan-kesatuan aksi di atas menuntut agar dibubarkannya PKI dan perbaikan ekonomi. Terlebih setelah dibentuknya barisan Front Pancasila. Pemuda dan mahasiswa lalu mengeluarkan tiga tuntutan atau yang dikenal dengan istilah Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI bersama KAPPI yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR untuk mengajukan Tritura tersebut. Isinya:

1. Pembubaran PKI
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur Gerakan 30 September 1965
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi

Presiden Soekarno menanggapi aksi itu dengan mengumumkan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Namun tidak membubarkan PKI ataupun menindak tokoh-tokoh yang dianggap terlibat peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Di saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada 24 Februari 1966, mahasiswa melakukan aksi di sekitar Istana Merdeka. Aksi itu menimbulkan bentrok antara mahasiswa dengan Pasukan Cakrabirawa yang menyebabkan gugurnya mahasiswa bernama Arief Rachman Hakim. Menindak aksi itu presiden Soekarno membukarkan KAMI.

Kebijakan presiden tersebut, di balas dengan aksi demonstrasi dan penyerbuan mahasiswa terhadap gedung Departemen Luar Negeri dan kantor berita China, *Hsin Hua*.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Orde Baru	Pertemuan ke	: 15

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa Demokrasi Terpimpin dengan masa Orde Baru.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi awal munculnya Orde Baru (Supersemar dan dualisme kepemimpinan).• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat artikel tentang Supersemar dan dualisme kepemimpinan.• Peserta didik membuat artikel dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat artikel .• Setelah selesai, artikel dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Tuliskan isi dalam Supersemar!	<p>Isi Supersemar yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. 	50
2.	Jelaskan kronologi pengunduran diri Soekarno dari kepresidenan!	Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Setelah membahas pelnawaksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga, pada 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuain dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Latar belakang Supersemar

Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965.

Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara.

Puncaknya pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan.

Permintaan itu dititipkan Soeharto kepada tiga jenderal AD yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor, 11 Maret 1966 sore. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi). Permintaan Soeharto dianggap biasa oleh Soekarno. Maka, pada 11 Maret 1966 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan.

Isi Supersemar

Selama ini beredar beberapa versi Supersemar. Ada yang dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan dari Akademi Kebangsaan. Namun dari berbagai versi yang beredar, tak ada satu pun yang asli. Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Supersemar yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan.

Isi Supersemar yakni:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Tujuan Supersemar Supersemar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, Setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR.

Keputusan tersebut berisi:

1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang
2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S
3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945.

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Supersemar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan Dualisme Kepemimpinan Nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto.

Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Tap. MPRS. No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Pada 7-12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.

Akhirnya, pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato NAWAKSARA dalam persidangan MPRS berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Lantaran isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G 30 S PKI maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota MPRS.

Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Setelah membahas pelnawaksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga, pada 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.

Maka pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Orde Baru	Pertemuan ke	: 16

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di bidang politik.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi kebijakan pemerintahan Orde Baru di bidang politik.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat buklet tentang kebijakan pemerintahan Orde Baru di bidang politik.• Peserta didik membuat buklet dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat buklet.• Setelah selesai, buklet dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Apa yang dimaksud dengan konsep Dwi Fungsi Abri?	Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.	50
2.	Jelaskan isi dari Trilogi Pembangunan!	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Kebijakan Politik Orde Baru

1. Stabilitas Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan

Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);
2. Menyusun dan merencanakan Repelita;
3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971;
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan 'pelemahan' atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan kelompok Islam Fundamentalists (yang sering disebut kaum ekstrimis kanan).

Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 23 tanggal 23 Mei 1970.

Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik (parpol) yang diijinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) ditambah dengan Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut: Golkar (236 kursi, 62,82%), NU (58 kursi, 18,68%), Parmusi (24 kursi, 5,56%), PNI (20 kursi, 6,93%), PSII (10 kursi, 2,39%), dan Parkindo (10 kursi, 2,39%). (Anhar Gonggong ed, 2005: 150) .

Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa "demokrasi parlementer". Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antarpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis, bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu, yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.

Namun adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang ada berfusi ke dalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti bergabung dalam PPP. Sementara itu lima partai non Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. (Gonggong dan Asy'arie, ed, 2005).

Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa kedalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk Trilogi Pembangunan. Suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat.

Trilogi Pembangunan

4. *Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.*

5. *Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.*

6. *Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.*

Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan. Itulah kira-kira makna pesan yang terangkum dalam Trilogi Pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorkan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila.

Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Stabilitas Nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya "Kemanusiaan

Yang Adil dan Beradab". Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masing-masing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal di manapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab, dalam aspek apapun tidak dapat ditoleransi. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan.

2. Stabilitas Penyeragaman

Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut.

Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi; (4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gonggong ed, 2005: 159).

Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksana dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional.

Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai Perguruan Tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah "suku", "agama", "ras", dan "antargolongan", (Sara). Menurut pemerintah Orde baru, "sara" merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial.

Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh memperlmasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan Sara. Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam; dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah sara. Meskipun demikian, akhirnya konflik yang bermuatan sara itu tetap tidak dapat dihindari.

Pada tahun 1992 misalnya, terjadi konflik antara kaum muslim dan non muslim di Jakarta (Ricklefs, 2005: 640). Demikian pula halnya dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4. Fakta ini kemudian disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali. Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan "asas tunggal".

Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru, Riau, tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980. Gagasan Asas Tunggal ini pada awalnya menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama.

Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto tetap meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui Sidang MPR "Asas Tunggal" akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu; Tap MPR No.II/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka.

Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 tentang ormas, yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua sudah seragam.. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup "bhineka tunggal ika", dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebhinnekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru.

3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI

Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai "jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparat pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.

Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968.

Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditematkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dimana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI. Selain itu, para ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri.

Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973), ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer.

Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar (dalam DPR dan MPR) melalui Fraksi Karya ABRI. Namun keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR; serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR sendiri, ABRI (wakil militer) mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a). Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang "dikaryakan", (b). Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai "partai politik" yang berkuasa pada waktu itu, (c). ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Orde Baru	Pertemuan ke	: 17

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di bidang ekonomi.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi kebijakan pemerintahan Orde Baru di bidang ekonomi.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresmum materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat vlog tentang kebijakan pemerintahan Orde Baru di bidang ekonomi..• Peserta didik membuat vlog dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat vlog.• Setelah selesai, vlog dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Apa yang kalian ketahui tentang Repelita?	Repelita berisi program-program kongkrit yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, dalam repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut indikator saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020).	50
2.	Bagaimana cara pemerintah Orde Baru dalam menangani hutang luar negeri?	Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965.	50
			100

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru

Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga

tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965, seluruhnya berjumlah 2,358 Juta dollar AS. Dengan Perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis (US \$ 1.404 juta), negara Barat (US \$ 587 juta), sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional.

Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya.

Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965.

Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan UU PMA, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru, berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya. Dengan bantuan modal mereka, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi dalam berbagai bidang ekonomi. Sebab dengan investasi mereka, lapangan kerja akan segera tercipta dengan cepat tanpa menunggu pemerintah memiliki uang terlebih dahulu untuk menggerakkan roda pembangunan nasional.

Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu, tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari 1967, di Amsterdam. Inisiatif itu datang dari pemerintah Belanda. Pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketuanya.

Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung.

Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) No.6 1968. Satu hal dari UUPMDN adalah adanya klausul yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UUPMA dan UUPMDN pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM). Berdasarkan Keppres no.286/1968 badan itu berubah menjadi Team Teknis Penanaman Modal (TTPM). Pada Tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga saat ini.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan, dari 650% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama akan dimulai pada tahun berikutnya (1969). Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai 8.88%) pada tahun 1971.

Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui Program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (Pelita) yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Adapun Repelita yang berisi program-program kongkrit yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, dalam repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut indikator saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020).

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Materi pokok	: Kondisi Indonesia Masa Orde Baru	Pertemuan ke	: 18

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis proses integrasi Timor-Timur ke Indonesia.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran sekaligus melakukan apersepsi.
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi proses integrasi Timor-Timur ke Indonesia.• Guru memberikan penjelasan terkait materi sambil membimbing peserta didik untuk meresume materi yang dijelaskan.• Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.• Guru membimbing peserta didik untuk membuat vlog tentang proses integrasi Timor-Timur ke Indonesia.• Peserta didik membuat vlog dengan mengumpulkan sumber dari buku/internet.• Guru membimbing peserta didik membuat vlog.• Setelah selesai, vlog dikumpulkan kepada guru.• Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik.• Guru membagikan lembar kerja dalam bentuk soal tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya dilaksanakan ulangan harian (UH).• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

Butir Soal:

No.	Pertanyaan	Kunci Jawaban	Poin
1.	Jelaskan latar belakang integrasi Timor-Timur ke Indonesia!	<p>Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis.</p> <p>Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer). Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinoza. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.</p>	50

- Penilaian Keterampilan (Penugasan)

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuaian dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

B. MATERI

Integrasi Timor-Timur

Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis.

Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer). Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan secara langsung dengan

wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spínola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.

Di Timor-Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: (1) *Uniao Democratica Timorese* (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor) yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal; (2) *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal –Komunis dan ingin segera merdeka; dan (3) *Associaçao Popular Democratica Timorese* (Apodeti- Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista.

Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu

mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor-Timur yang berada di “halaman belakang” jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti.

Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung “Proklamasi Balibo” yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalhista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia.

Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan “Operasi Seroja” pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat (AS) yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu Perang Dingin antara AS dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung.

Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui Tap MPR Nomor IV/MPR/1978. Timor Timur secara resmi menjadi propinsi ke-27 di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Sekampung	Kelas/Semester	: XII/Ganjil
Mata pelajaran	: Sejarah Indonesia	Alokasi Waktu	: 1 kali pertemuan (2 x 45 menit)
Kegiatan	: Ulangan Harian (UH) 2 Orde Baru	Pertemuan ke	: 19

A. Tujuan Pembelajaran	
Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:	
1. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.	
B. Alat dan Akses/sumber Belajar	
1. Alat : Papan tulis, spidol, kertas, pena, handphone android dan laptop.	
2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.	
C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran	
1. Pendekatan : Saintifik (scientific).	
2. Model : Discovery learning.	
3. Metode : Tes Tertulis.	
D. Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru melakukan absensi terhadap peserta didik.• Guru membimbing peserta didik melakukan literasi (membaca Al-Quran/buku/artikel).• Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.• Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk ulangan harian (UH).
Inti	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi yang akan diujikan.• Guru memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan ulangan harian (UH).• Guru membagikan lembar soal dalam bentuk tes tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa.• Guru melakukan penilaian sikap peserta didik.• Guru bersama peserta didik mengoreksi soal yang dikerjakan.• Guru memberikan penguatan terkait materi yang telah diujikan guna persiapan remedial dan pengayaan.
Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan penjelasan program remedial dan program pengayaan.• Guru menyampaikan rencana materi belajar untuk pertemuan selanjutnya.• Guru memberikan apresiasi, motivasi dan mengajak peserta didik berdoa.• Guru menutup salam.
E. Penilaian	
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik. <i>Terlampir</i>

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Sekampung

Sekampung, Juli 2021
Guru Mapel Sejarah

SEDONO, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 196204141986011002

ADI SETIAWAN, S.Pd
NIP.-

LAMPIRAN PENILAIAN, REMEDIAL DAN PENGAYAAN

A. PENILAIAN

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29

- Penilaian Pengetahuan (Tertulis)

- Butir Soal:

1. Jelaskan tentang fusi partai yang terjadi pada tahun 1973! (*point 20*)
2. Jelaskan tentang konsep Trilogi Pembangunan dan makna yang terkandung di dalamnya! (*point 20*)
3. Jelaskan perbedaan antara Pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan masa kini! (*point 20*)
4. Jelaskan, alasan diadakannya referendum di Timor-Timur! (*point 20*)

- Kisi-kisi Soal

Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian (UH)

Sekolah : SMA Negeri 1 Sekampung
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
 Kelas : XII
 Bentuk Soal : Uraian
 Jumlah Soal : 4

No.	Kompetensi Dasar	Kelas	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	No. Soal	Bentuk Soal
1.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.	12	Fusi Partai	Menganalisis sistem politik masa Orde Baru	L2	1	Uraian
2.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.	12	Trilogi Pembangunan	Menganalisis pelaksanaan Trilogi Pembangunan	L2	2	Uraian
3.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.	12	Pemilu di Masa Orde Baru	Menganalisis kondisi politik masa Orde Baru	L2	3	Uraian
4.	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.	12	Integrasi Timor-Timur	Menganalisis proses integrasi di Timor-Timur.	L2	4	Uraian

- Program Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru memberikan perlakuan penyampaian materi kembali dengan moda daring (peserta didik menyimak bahan ajar/video yang guru bagikan). Kemudian peserta didik diberikan soal tambahan, sebagai berikut :

Membuat video vlog tentang kondisi politik dan ekonomi masa Orde Baru. (*Poin 100*)

No	Nama	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Ket
1						
2						
Dst						

- **Program Pengayaan**

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan berupa :

Membuat video vlog mengenai pengalaman masyarakat Indonesia di masa Orde Baru. *Poin 100*)

- **Penilaian Keterampilan (Penugasan)**

Melalui produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.

- Rubrik Penilaian Keterampilan:

No.	Nama	Kesesuain dengan Jawaban dengan Pertanyaan	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	Kreasi dan Inovasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat A nilai 85-100, B nilai 70-84, C nilai 50-69, D 30-49 E 0-29